

01 Peninjauan Kembali_RTRW_Presentation

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Barru 2011–2031 Tahun 2020

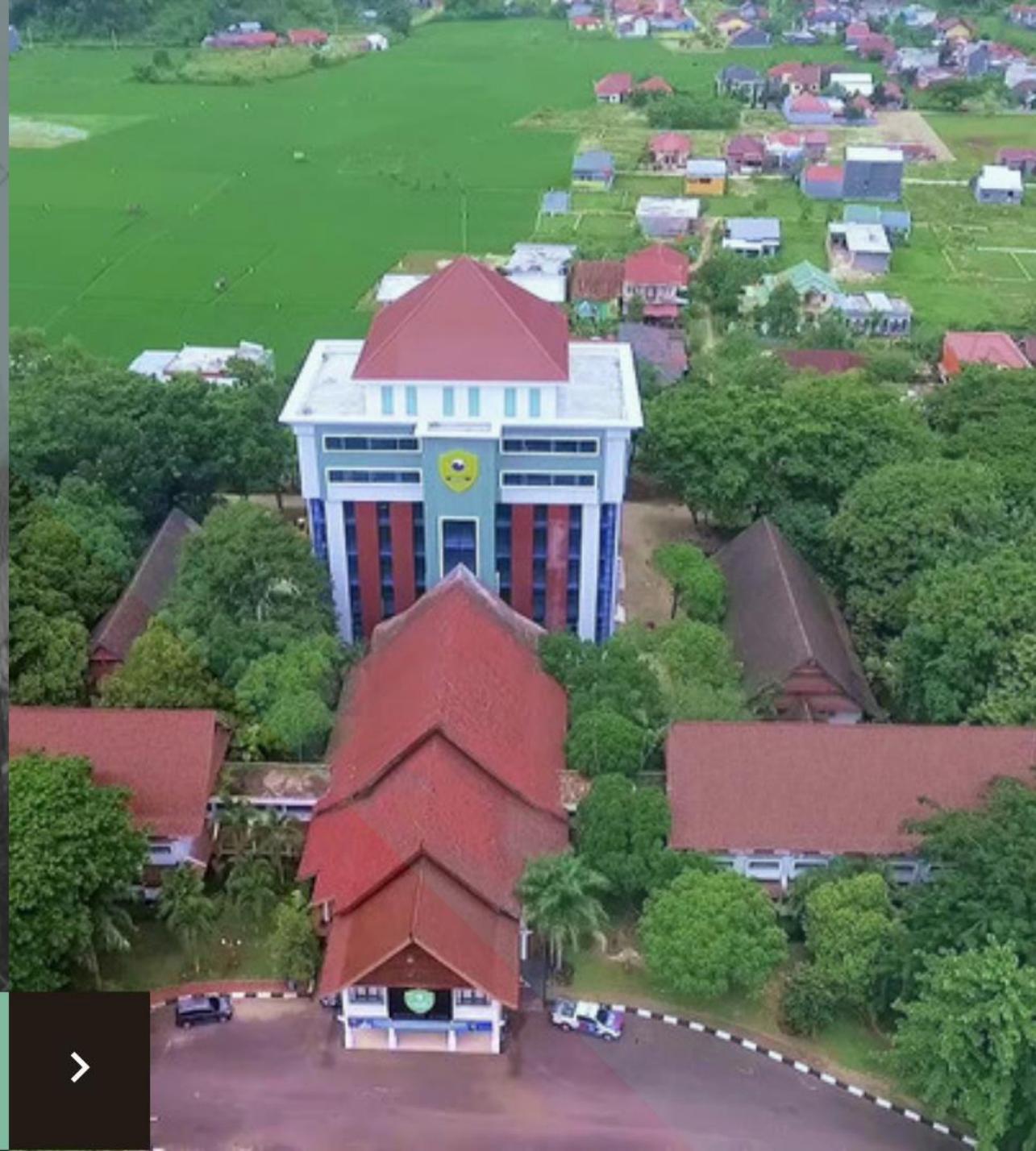
FORUM GROUP DISCUSSION

Laporan Akhir

Acuan :
Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Sultan Hasanuddin No.82, Sumpang Binangae, Kec. Barru,
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90712



OUT LINE

- A PENDAHULUAN
- B ISU STRATEGIS KAB. BARRU
- C PROFIL WILAYAH KAB. BARRU
- D REVIEW KEBIJAKAN
- D PENILAIAN PELAKSANAAN PK RTRW KABUPATEN BARRU
- E KESIMPULAN
- F REKOMENDASI PERUBAHAN MUATAN RTRW

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

1



UU No. 11 Tahun 2020 Ttg Cipta Kerja, Pasal 26 Ayat 5

“RTRW Wilayah Kabupaten memiliki jangka waktu **selama 20 (dua puluh) tahun**. Dilakukan peninjauan kembali sebanyak **1 (satu) kali dalam waktu lima tahun**

2



RTRW Kabupaten Barru telah disahkan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Barru pada tahun 2012. tahun 2020 RTRW Kabupaten Barru memiliki umur perencanaan **sekitar 9 tahun sejak diperdakan. RTRW yang ada saat ini dirasa belum memenuhi keinginan dan mendukung dinamika pembangunan yang ada di Kabupaten Barru.**

MAKSUD

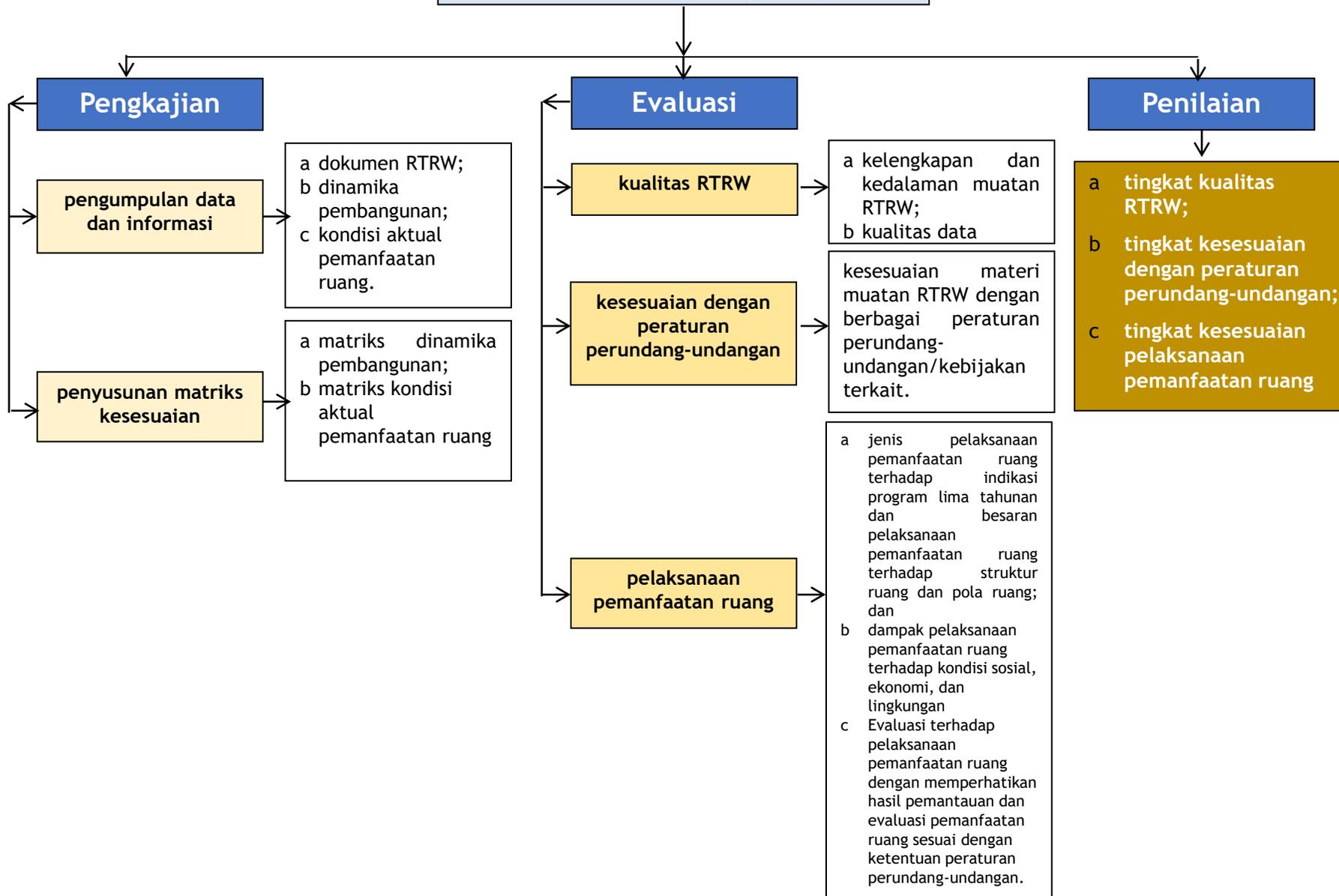
- Menyiapkan Materi PK RTRW Kabupaten Barru (Perda No. 4/2012) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi.



TUJUAN/SASARAN

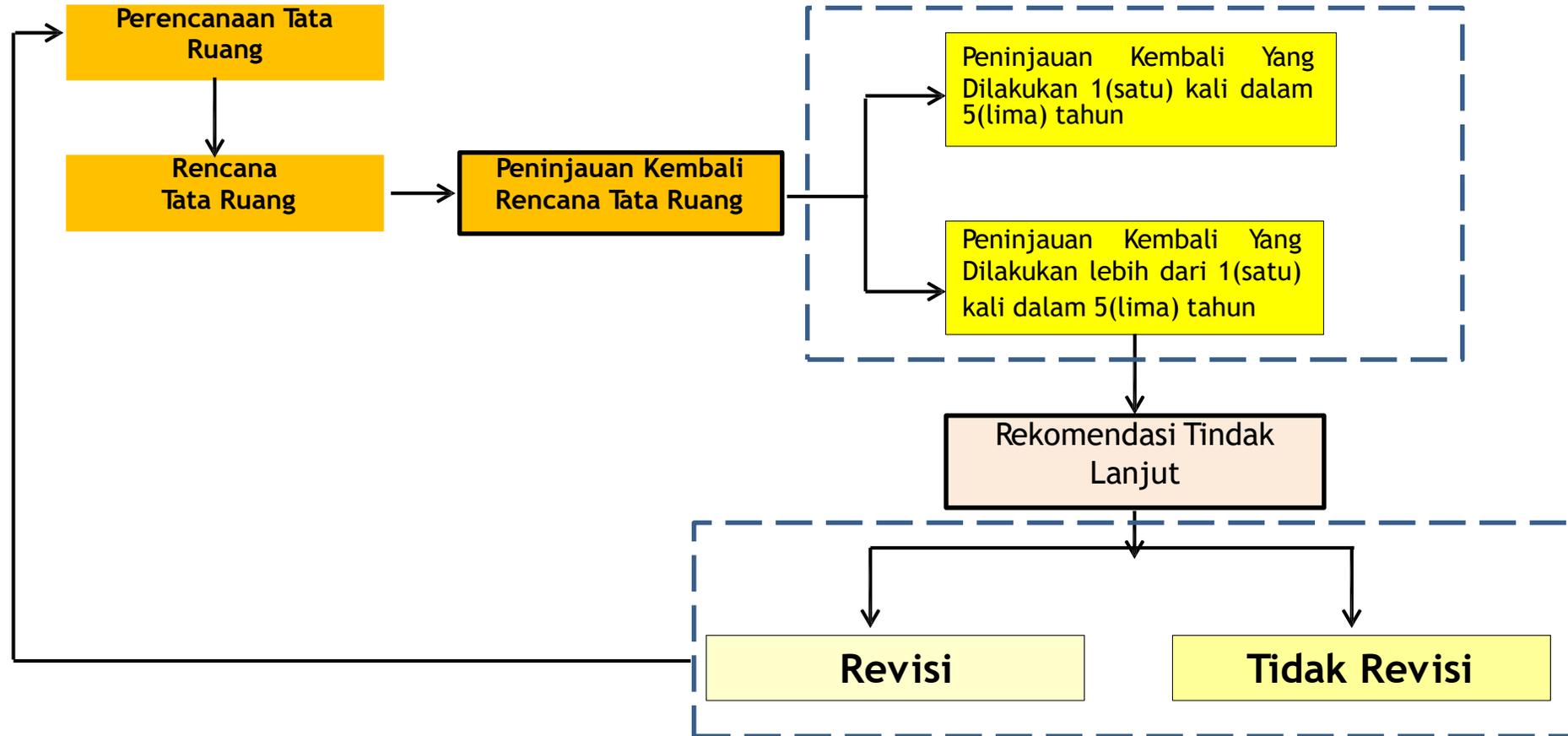
- Melakukan kajian, evaluasi, dan penilaian terhadap substansi RTRW Kabupaten Barru (Perda No. 4/2012) dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Barru.

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

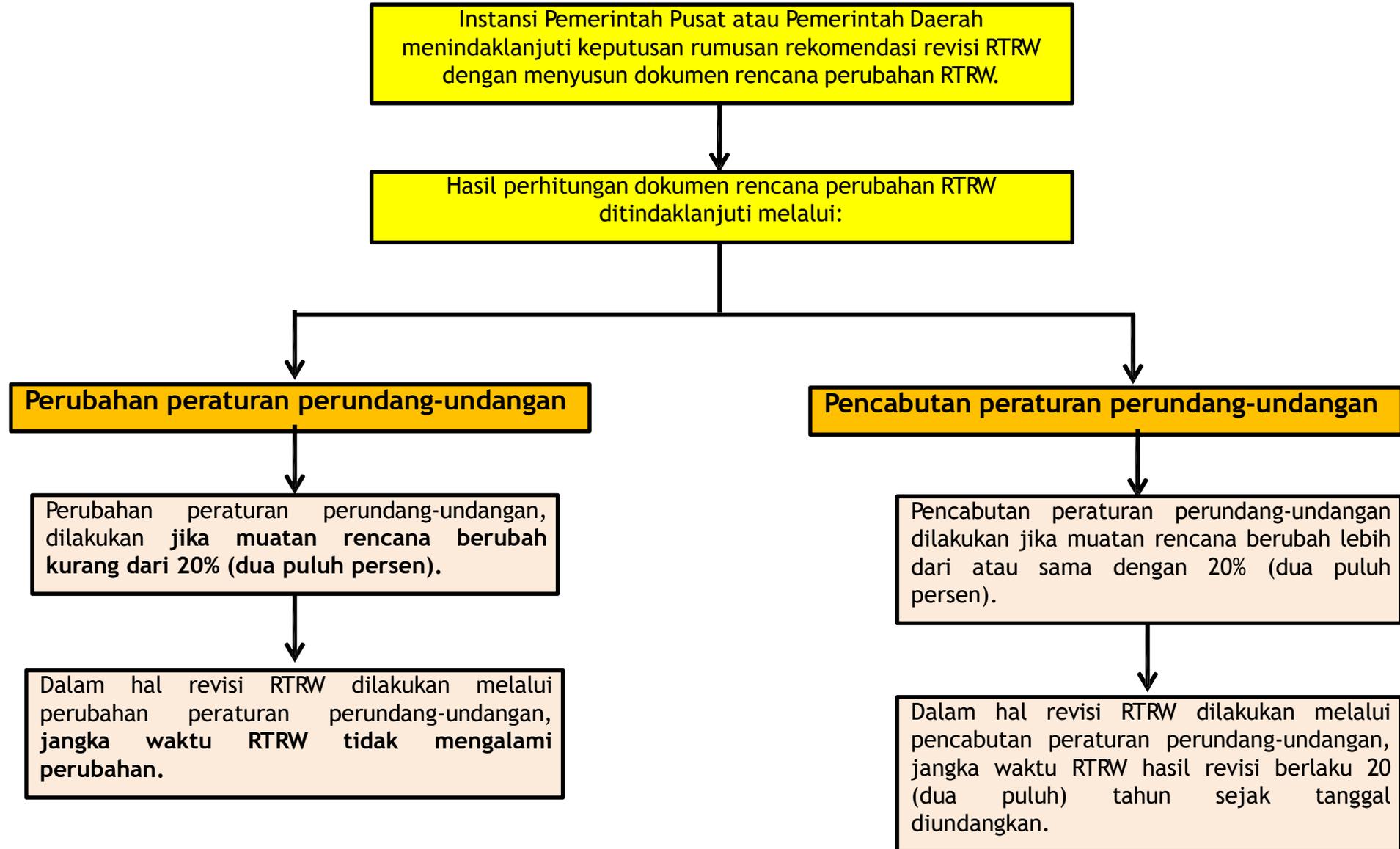


KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Sumber: Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW



TINDAK LANJUT RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH



B. Isu Strategis Kab. Barru

ISU STRATEGIS WILAYAH KAB. BARRU

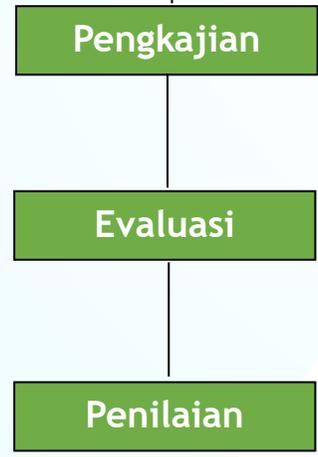


- DOKUMEN PERENCANAAN:
 1. RPJP SULSEL
 2. RPJMD SULSEL
 3. RPJPS KAB. BARRU
 4. RPJMD KAB. BARRU
 5. RENSTRA SEKTOR
- DOKUMEN SPASIAL:
 1. RTRW PROVINSI
 2. RTRW KAB. BARRU

- 1. PENDEKATAN MAKRO: PENYUSUNAN DIM YANG DIDASARKKAN PADA ISU STRATEGIS
- 2. PENDEKATAN MIKRO: PENY. DIM ATAS MUATAN PERDA RTRW KAB. BARRU (BATANG TUBUH DAN LAMPIRAN INDIKASI PROGRAM) YANG DIRUMUSKAN BERDASARKAN INDIKASI DUKUNGAN SEKOR YANG DINYATAKAN DALAM DOKUMEN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Rekomendasi PK RTRW Barru (Permen 6/2017, Pasal 15)



- 1. Pusat Pelayanan dan Permukiman
- 2. Jaringan Transportasi.
- 3. Jaringan Energi Kelistrikan.
- 4. Jaringan Telekomunikasi.
- 5. Sumber Daya Air dan Kebutuhan Air Bersih
- 6. Pra/Sarana lingkungan (persampahan, limbah, drainase).
- 7. Pemertahanan Kawasan Lindung.
- 8. Pemanfaatan Kawasan Budidaya (darat dan laut)
- 9. Pemanfaatan Kawasan Pariwisata
- 10. Pemanfaatan Kawasan Industri & daya saing perdagangan
- 11. Pemanfaatan Laut Umum
- 12. Struktur Ekonomi dan Pembiayaan
- 13. Perwujudan KSP dan KSK pertumbuhan ekonomi dan SDA

Dinamika Pembangunan Kabupaten Barru

No	Dinamika Pembangunan	Implikasi Dampak perubahan terhadap muatan RTRW Kabupaten Barru
I	Lingkup Internasional	
1.	<i>Isu Lingkungan Hidup</i> <ul style="list-style-type: none">• kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala <i>global warming</i>/iklim dunia,.	<ul style="list-style-type: none">• Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelestarian dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barru untuk saat ini dan masa datang bagi generasi berikutnya.
2.	<i>Isu Perekonomian Bebas</i> <ul style="list-style-type: none">• Implementasi AFTA 2002, MEA 2015.• Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Barru
3.	<i>Perkembangan Teknologi Informasi dan Transportasi</i> <ul style="list-style-type: none">• Pesatnya teknologi transportasi dan informasi mengakibatkan jarak baik dari pengertian ruang maupun waktu menjadi relatif tidak ada artinya lagi.	<ul style="list-style-type: none">• Berimplikasi pada perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Barru.
4.	<i>Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)</i> <ul style="list-style-type: none">• Menurunkan angka kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dll	<ul style="list-style-type: none">• Berimplikasi pada perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Barru.

Dinamika Pembangunan Kabupaten Barru

No	Dinamika Pembangunan	Implikasi Dampak perubahan terhadap muatan RTRW Kabupaten Barru
II	Lingkup Nasional	
1	UU No. 11 Tahun 2020 Ttg Cipta Kerja Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan agenda pembangunan nasional, RTRWN 2017	Tujakstra pembangunan di Kabupaten Barru lebih terarah dan sesuai kewenangannya.
2	Program pembangunan nasional (K/L) dan Peraturan Perundang-Undangan	Penetapan perwujudan rencana struktur dan pola ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.
III	Lingkup Regional Provinsi Sulawesi Selatan	
1.	Kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD 2016-2021) dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2009	Tujakstra dan perwujudan rencana struktur, rencana pola ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.
IV	Lingkup Kabupaten Barru	
1.	Potensi Sumber daya alam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pertambangan 2. Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan 4. Potensi Perkebunan dan Peternakan 5. Potensi Energi Listrik, Minyak dan Gas 6. Potensi Energi Terbarukan 7. Potensi Industri 8. Potensi Perhubungan, Aksesibilitas dan Logistik 	Penguatan dan percepatan implementasi rencana program pemanfaatan ruang dan kebijakan dan rencana strategis program unit instansi pusat dan daerah di Kabupaten Barru.

Dinamika Pembangunan Kabupaten Barru

No	Dinamika Pembangunan di Kabupaten Barru	Keterangan
A	Keterkaitan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	
1	Penghapusan kawasan strategis kabupaten	perubahan isi muatan RTRW dan muatan perda RTRW Kabupaten Barru
2	penghapusan pengaturan perizinan menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Perubahan dan penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang
B	Keterkaitan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional/Draf RTRW Sulsel/Perda No. 1 Tahun 2018 RZWP3K Sulsel	
1	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Garongkong sebagai penyangga IKN	belum diakomodir
2	Pegembangan Terminal Mattirowalie	belum diakomodir
3	Rencana Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api	Perubahan sistem jaringan dan stasiun
4	Pelabuhan Pengumpan lokal (PL), meliputi pelabuhan; Lamuru Kung, Waeluo di Kabupaten Barru	Update/Keputusan Menteri Perhub No KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
5	Pembangunan Rest Area	belum diakomodir
6	Pembangunan Jalan poros Baluso (Barru) -Soppeng	Update/perubahan status jalan
7	Pembangunan PLTU Bawalusu	belum diakomodir/RUPTLN
8	Pembangunan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: (a) PLTD-PLTD Barru; (b). PLTU-PLTU Barru 01 dan 02	belum diakomodir/RUPTLN
9	Mitigasi Bencana alam (Banjir, Longsor dll)	update
10	pengembangan KEK di Kabupaten Barru	update
11	Kawasan Pertambangan merupakan Wilayah pertambangan (WP)	belum diakomodir
12	KP2B di Kabupaten Barru seluas 9.494,82 Ha	belum diakomodir
13	kawasan perikanan tangkap dan budidaya	update/Perda 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K Sulsel

Geografis & Administrasi



C. PROFIL WILAYAH KAB. BARRU

Letak Astronomis	Kabupaten Barru terletak di antara 4°5'49" - 4°47'35" lintang selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" bujur timur (sumber : RTRW Kab. Barru 2012)
Luas Wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Perda No. 4 Tahun 2012 Luas wilayah : 119.109,80 Ha• BPS (1.174, 72 Km2)• Kebijakan Satu Peta (KSP) Luas wilayah : 120.386,49 Ha
Batas Wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap.• Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.• Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.• Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

ASPEK FISIK DASAR WILAYAH

Peta Curah Hujan



Peta Air Tanah



Peta Jenis Tanah



Peta Jenis Batuan



Peta Kelerengan



Peta DAS



Peta Topografi



Curah Hujan	kisaran > 3000 mm/tahun seluas 48,61 % dari luas wilayah Kabupaten Barru, sedangkan kondisi terendah pada kisaran 1000 s/d 1500 mm/tahun seluas 1,84 % dari luas wilayah
Air Tanah	Jenis fresh (<250 ppm NaCl), brackish (250-4000 ppm NaCl), fresh/brackish, none or slight
Jenis Tanah	Jenis Tanah Aluvial Muda, Jenis Tanah Litosol , Jenis Tanah Regosol, Jenis Tanah Mediteran
Batuan	Aluvium muda; Aluvium; Andesit, basalt; Batu gamping; Batu gamping, batu karang, napal; Batu karang, Batu pasir, batu lanau, batu lumpur, serpih, konglomerat; Kuarsit, skis, filit; Marmer, batu gamping; Peridotit, serpentin; Serpentin, peridotit, dunit; Serpih, batu lumpur, batu pasir, dan Tefra
Kelerengan	0 - 2%, 2 - 15%, 15 - 40% dan > 40%.
Topografi	ketinggian 0 - 300 mdpl - 300 sampai 1000 m

D. Review KEBIJAKAN

**PERDA NO.
4 TAHUN 2012**

mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Barru yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, asri dan lestari, yang berbasis potensi geografis, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barru sebagai kabupaten yang majudansenantiasa meningkatkan kearifan lokal

01

**PP No.
13 TAHUN 2017**

PKW; Kawasan Perkotaan Barru

02

**PERPRES No.
88 TAHUN 2011**

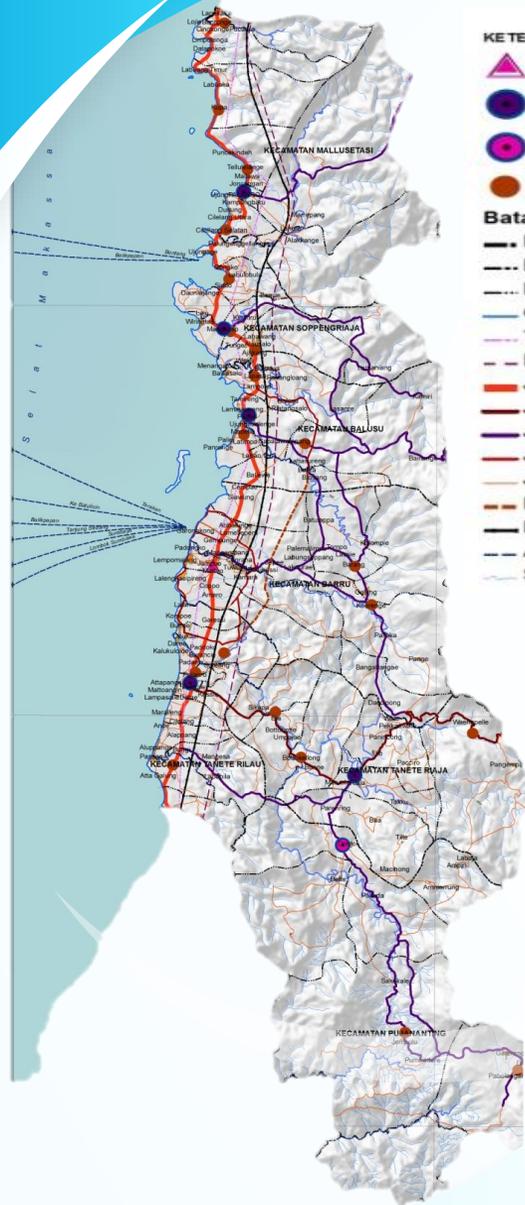
PKW Barru : Pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

03

**PERDA NO.
9 TAHUN 2019**

PKW Perkotaan Barru, KEK Kota Emas Kab. Barru

04



KETERANGAN:

- ▲ PKW
- PKLp
- PPK
- PPL
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Transmisi Eksisting 150 kV
- Mikro Analog
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Rencana Rel Kereta Api
- Alur Pelayaran
- Sungai

No	PKW	No	PKL	No	PKLp	No	PPK	No	PPL
1.	Garongkong di Kecamatan Barru (I-IV/B/1)	1.	Kawasan Perkotaan Barru Ibukota Kabupaten Barru (I-IV/B/1)	1.	Palanro di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)	1.	Doi-doi di Kecamatan Pujananting (I-IV/C/1)	1.	Tompo di Kecamatan Barru (I-IV/C/1)
				2.	Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja (I-IV/C/1)			2.	Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)
				3.	Ralla di Kecamatan Tanete Riaja (I-IV/C/1)			3.	Tanete di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)
				4.	Takkalasi di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)			4.	Pancara di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)
				5.	Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)			5.	Cilellang di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
								6.	Mallawa di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
								7.	Kupa di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
								8.	Bojo Baru di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
								9.	Madello di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)
								10.	Lampoko di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)
								11.	Kamiri di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)
								12.	Kiru-kiru di Kecamatan Soppeng Riaja (I-IV/C/1)
								13.	Siddo di Kecamatan Soppeng Riaja (I-IV/C/1)
								14.	Ajakkang di Kecamatan Soppeng Riaja (I-IV/C/1)
								15.	Lompo Tengah di Kecamatan Tanete Riaja (I-IV/C/1)
								16.	Harapan di Kecamatan Tanete Riaja (I-IV/C/1)
								17.	Kading di Kecamatan Tanete Riaja (I-IV/C/1)
								18.	Pujananting di Kecamatan Pujananting (I-IV/C/1)
								19.	Gattareng di Kecamatan Pujananting (I-IV/C/1)

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pelayanan

Uraian

Luas (Ha)

Uraian	Luas (Ha)
Kawasan Budidaya	67376.798
Hortikultura	3772.941
Hutan Produksi Biasa	17290.314
Hutan Rakyat	5923.355
Perkebunan	14046.907
Permukiman	3771.635
Pertambangan	1490.564
Pertanian Lahan Basah	14322.152
Pertanian Lahan Kering	1785.698
Peternakan Besar	2290.543
Tambak	2682.689
Kawasan Lindung	51733.308
Hutan Lindung	51389.525
Kawasan Mangrove	343.783
Grand Total	119110.106

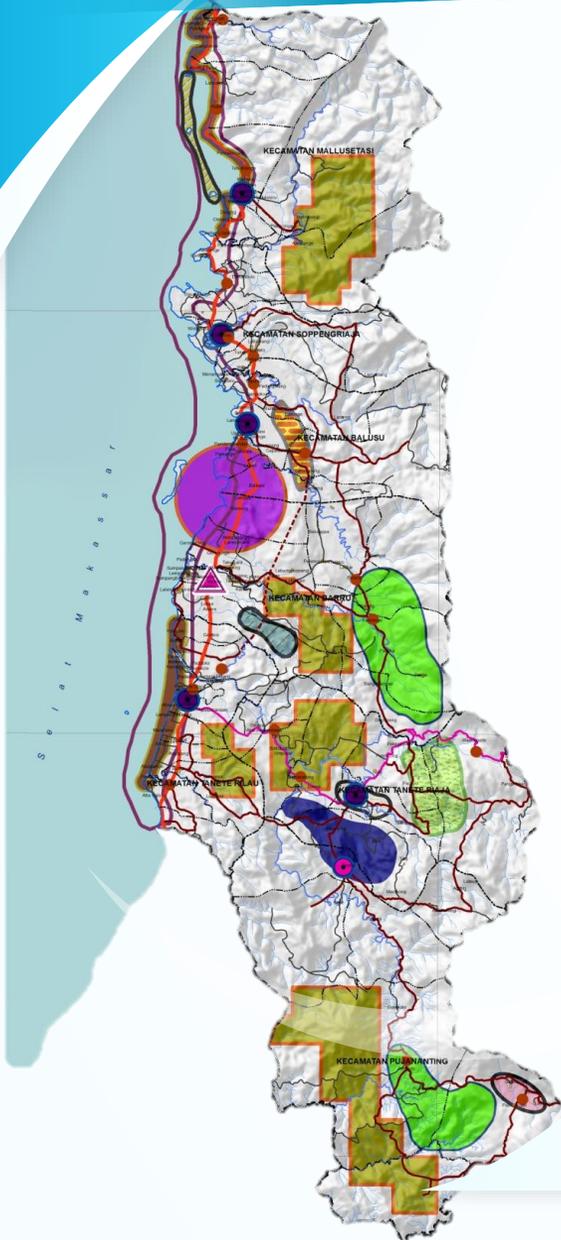
KETERANGAN:

-  PKW
-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer
-  Jalan Kolektor Sekunder
-  Jalan Lokal Primer
-  Jalan Lokal Sekunder
-  Rencana Jalan Lokal Primer
-  Sungai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Hutan Lindung
-  Kawasan Mangrove
-  Hutan Produksi Biasa
-  Hutan Rakyat
-  Hortikultura
-  Perkebunan
-  Pertambangan
-  Permukiman
-  Pertanian Lahan Basah
-  Pertanian Lahan Kering
-  Peternakan Besar
-  Tambak



PETA RENCANA POLA RUANG

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

- KSP kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
Pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garungkong dan simpul transportasi darat, laut, dan kereta api berupa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Garungkong.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

- Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, meliputi;
 - Kawasan minapolitan di Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Mallusetasi;
 - Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tanete Riaja;
 - Kawasan industri pertambangan kapur pertanian di Kecamatan Balusu;
 - Kawasan pertambangan kromit dan serpentinit di Kecamatan Barru;
 - Kawasan pertambangan marmer, kromit, batubara dan emas di Kecamatan Pujananting;
 - Kawasan pertambangan batu gamping, tanah liat, batubara dan pasir kuarsa di Kecamatan Tanete Riaja;
 - Kawasan pertambangan tras dan pasir besi di Kecamatan Mallusetasi;
 - Kawasan pertambangan pasir besi di Kecamatan Tanete Rilau;
 - Kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garungkong dan simpul transportasi darat, laut dan kereta api di kawasan potensial pengembangan ekonomi EMAS.
 - Kawasan Agropolitan pertanian, perkebunan hasil ternak dan hasil hutan di Kecamatan Barru.
 - Kawasan Agropolitan (pertanian, hasil ternak dan hasil hutan) di Kecamatan Pujananting.
- Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi;
 - Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Mallusetasi;
 - Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Penggunaan Teknologi Tinggi;
 - Panas Bumi di Kalompie Kecamatan Barru;
 - Gas alam di Ralla Kecamatan Tanete Riaja;
 - Kawasan industri semen portland di Kecamatan Tanete Riaja;
- Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya;
 - Kawasan budaya lokal perkampungan Suku Tobalo;
 - Kawasan pendidikan Pesantren Mangkoso.

E. PENILAIAN PELAKSANAAN PK RTRW KABUPATEN BARRU

Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kabupaten Barru

No.	Muatan RTRW Kabupaten Barru	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	2,5
2.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	2,1
3.	Rencana Pola Ruang	2,92
4.	Penetapan Kawasan Strategis	2.4
5.	Arahan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Lima Tahunan	3
6.	Arahan Pengendalian Ruang	2.25
Total Keseluruhan		15,198
Nilai Rata-Rata		2.53

Kualitas Data RTRW Kabupaten Barru

No.	Jenis Data	Jumlah & Jenis Data di nilai	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Data Wilayah Administrasi	4	2,25
2.	Data Fisiografis	7	2,16
3.	Data Kependudukan dan sumberdaya manusia	4	1,20
4.	Data Ekonomi dan Keuangan serta kelembagaan	3	0,75
5.	Data Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar	6	1,5
6.	Data Penggunaan Lahan	4	1,5
7.	Data Peruntukan Ruang	15	1,32
8.	Data Daerah Rawan Bencana	1	0,75
9.	Peta Dasar dan Peta Tematik Skala 1 : 50.000	10	1,77
Total Keseluruhan		54	13,21
Rata-Rata			1.46

Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang terkait	Jumlah Catatan Kesesuaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Undang - Undang	44	32
2.	Peraturan Pemerintah	28	27
3.	Peraturan Presiden	5	1
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Barru	6	0
5.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	10	9
Jumlah		94	204
		Nilai Rata-Rata	2,17

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Barru

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Nilai Realisasi Pemanfaatan Ruang	Nilai Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan	Ket
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG		265	281	
a.	perwujudan sistim perkotaan	203	235	
b.	perwujudan sistem Prasarana	62	46	
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG		90	101	
a.	perwujudan rencana pola ruang	54	52	
b.	perwujudan Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten)	36	49	
		286	254	
Jumlah Kajian Realisasi Pemanfaatan Ruang		231		
Jumlah Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang			205	
<i>Nilai Rata - rata</i>		1,44	1,59	

Rekapitulasi Hasil Penilaian

No	Aspek Penilaian	Nilai
I.	Kualitas RTRW Kabupaten Barru	
1.	Kelengkapan dan Kedalaman Muatan RTRW Kab. Barru	2.53
2.	Kualitas Data	1.46
	Total	3.99
	Nilai Rata-rata	1.99
II.	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan	
1.	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan	2.17
	Total	2.17
	Nilai Rata-rata	2.17
III.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	
1.	Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1.44
2.	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1.59
	Total	3.03
	Nilai Rata-Rata	1.52

Rekapitulasi Akhir Hasil Penilaian PK RTRW Kabupaten Barru

No.	Aspek	Nilai Akhir	Bobot	Perkalian Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)
I.	Kualitas RTRW Kabupaten Barru	1.99	30	61.80
II.	Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan	2.17	30	73.80
III.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1.52	40	84.00
	Total	5.67	100	185,2
	Rata-Rata Penilaian Akhir RTRW Kabupaten Barru	1.89		61,73

Sumber : Analisis Penyusun, 2020

Catatan :

Jika nilai akhir ≥ 85 : RTRW dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI)

Jika nilai akhir < 85 : RTRW dinyatakan berkualitas BURUK (RTRW DIREVISI)

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penilaian akhir, diperoleh hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Barru bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru perlu direvisi. Sesuai dengan hasil/nilai akhir peninjauan kembali ***RTRW Kabupaten Barru sebesar 61,73 (61,73 < 85) yang artinya RTRW dinyatakan berkualitas BURUK (RTRW DIREVISI).***

Penilaian Muatan RTRW Baru yang Direvisi

No.	Muatan RTRW Kabupaten Barru	Bobot Materi	Nilai Perubahan	Perkalian Bobot dan Nilai Perubahan (5) = (3) x (4)
1	2	3	4	(5) = (3) x (4)
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15.00%		
	1.1 Tujuan Penataan Ruang	5.00%	0	0
	1.2 Kebijakan Penataan Ruang	5.00%	0	0
	1.3 Strategi Penataan Ruang	5.00%	0	0
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	30.00%		
	2.1 Sistim Pusat Pelayanan			
	2.1.1 Sistim Perkotaan	5.00%		
	a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	1.25%	0	0
	b. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)	1.25%	0	0
	c. PPK (Pusat Pelayanan Kecamatan)	1.25%	0,5	0,0625
	d. PPL (Pusat Pelayanan Lokal)	1.25%	0,5	0,0625
	2.2 Sistim Jaringan Prasarana	25.00%		
	2.2.1 Sistim Jaringan Transportasi	9.00%		
	a. Sistim Jaringan Transportasi Darat	5.00%		
	1) Sistim Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.00%	0,5	0,01
	2) Sistim Jaringan SDP dan Kereta Api	2.00%	0,5	0,01
	3) Jaringan Transportasi Perkotaan dan Perdesaan	1.00%	0	0
	b. Sistim Jaringan Transportasi Laut	4.00%		
	1) Tatanan Kepelabuhanan	2.00%	0	0
	2) Alur Pelayaran Angkutan Laut	2.00%	0	0
	2.2.2 Sistim Jaringan Energi	3.20%		
	a. Pembangkit Tenaga Listrik	1.60%	0,5	0,008
	b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	1.60%	0,5	0,008
	2.2.3 Sistim Jaringan Telekomunikasi	3.20%		
	a. Sistim Jaringan Kabel/Terrestrial	1.60%	0	0
	b. Sistim Jaringan Nirkabel/Satelit	1.60%	0	0
	2.2.4 Sistim Jaringan Sumber Daya Air	3.20%		
	a. Sumber air	0.64%	0	0
	b. Prasarana sumberdaya air	0.64%	0	0
	c. Sistim jaringan Irigasi	0.64%	0	0
	d. Sistim Pengendalian Banjir	0.64%	0	0
	e. Sistim pengamanan pantai	0.64%	0	0
	2.2.5 Sistim Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	6.40%		
	a. Sistim Jaringan Persampahan	1.06%	0	0

	b. Sistim Jaringan Air Minum	1.06%	0	0
	c. Sistim Jaringan Air Limbah	1.06%	0	0
	d. Sistim Proteksi Kebakaran	1.06%	0	0
	e. Sistim Jaringan Drainase	1.06%	0	0
	f. Sistim Jalur Evakuasi Bencana	1.06%	0	0
3.	RENCANA POLA RUANG	30.00%		
	Rencana Pola Ruang			
	3.1 Kawasan Lindung	15.00%		
	3.1.1 Kawasan Hutan Lindung	3%	0	0
	3.1.2 Kawasan perlindungan setempat	3%	0	0
	3.1.3 Kawasan Suakan Alam, Pelestarian Alam, dan cagar budaya	3%	0	0
	3.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam	3%	0	0
	3.1.5 Kawasan Lindung Geologi dan Lainnya	3%	0	0
	3.2 Kawasan Budidaya	15.00%		
	3.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	1.36 %	0,5	0,0068
	3.2.2 Kawasan Hutan Produksi terbatas dan konversi	1.37 %	0	0
	3.2.3 Kawasan Peruntukan Rakyat	1.36 %	0,5	0,0068
	3.2.4 Kawasan Peruntukan pertanian	1.36 %	0,5	0,0068
	3.2.5 Kawasan Peruntukan Perikanan	1.37 %	0	0
	3.2.6 Kawasan Peruntukan Peternakan	1.37 %	0	0
	3.2.7 Kawasan Peruntukan Pertambanagn	1.36 %	0	0
	3.2.8 kawasan peruntukan Industri	1.36 %	0	0
	3.2.9 Kawasan Peruntukan Pariwisata	1.36 %	0	0
	3.2.10 Kawasan Peruntukan Permukiman	1.37 %	0	0
	3.2.11 Kawasan Peruntukan Lainnya	1.36 %	0	0
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	5.00%		
	4.1 Bidang Pertahanan dan Keamanan	1%	0,5	0,005
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi	1%	0	0
	4.3 Bidang Sosial Budaya	1%	0	0
	4.4 Bidang Pendayagunaan SDA dan / atau Teknologi Tinggi	1%	0	0
	4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	1%	0	0
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	10.00%		
	5.1 Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	5.00%		
	5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan	0,62%	0,5	0,0031
	5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan	0,63%	0	0
	5.1.3 Perwujudan Sistem Transportasi	0,62%	0,5	0,0031
	5.1.4 Perwujudan Sistem Jaringan Energi	0,63%	0,5	0,00315

Penentuan nilai tingkat perubahan didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kualitas RTRW, kesesuaian RTRW dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Nilai tingkat perubahan yang dimaksud yaitu:

- Muatan berubah total : 1
- Muatan berubah sebagian : 0,5
- Muatan tidak berubah : 0

Lanjutan Penilaian Muatan.....

	5.1.5 Perwujudan Sistem Jar. Telekomunikasi	0,62%	0	0
	5.1.6 Perwujudan Sistem Jar. Sumber Daya Air	0,62%	0,5	0,0031
	5.1.7 Perwujudan Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	0,63%	0	0
	5.1.8 Perwujudan Sistem Jar. Prasarana Lainnya	0,62%	0	0
	5.2 Pola Ruang Wilayah Kabupaten	5.00%		
	5.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung	2.50%	0	0
	5.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya	2.50%	0,5	0,0125
6.	ARAHAN PENGENDALIAN RUANG	10.00%		
	6.1 Indikasi Peraturan Zonasi	2.50%	0,5	0,0125
	6.2 Arahan Perizinan	2.50%	0	0
	6.3 Arahan Insentif dan Disinsentif	2.50%	0	0
	6.4 Arahan Sanksi Administratif	2.50%	0	0

Pasal 90 (PP 15/2010) yang menyatakan bahwa revisi dapat dilakukan melalui:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan, jika materi berubah tidak lebih dari 20%
2. Pencabutan peraturan perundang-undangan, jika materi berubah lebih dari 20%



Nilai akhir perubahan substansi muatan RTRW Kabupaten Barru 2011-2031 yaitu **22,39 % (>20.00%)**
Dengan demikian RTRW Kabupaten Barru 2011-2031 perlu direvisi melalui pencabutan Peraturan Daerah

E. Kesimpulan



1. Muatan rencana relative kurang mendalam. Sementara itu, data yang digunakan untuk perumusan rencana banyak yang kurang relevan dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Kualitas perpetaan juga perlu dilengkapi.
2. Muatan rencana tata ruang sebagian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditetapkannya RTRW Kabupaten Barru
3. Penyimpangan pemanfaatan ruang terjadi relative cukup besar, teridentifikasi dari beberapa program turunan pemanfaatan ruang belum semua terlaksana sesuai target lima tahun pertama yang ditetapkan dalam RTRW. Salah satu persoalannya adalah masalah pembiayaan, koordinasi dan perubahan baru organisasi perangkat daerah.

F. REKOMENDASI PERUBAHAN MUATAN RTRW

No.	Muatan RTRW Kabupaten Barru	Perubahan
1.	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	
	1.1 Tujuan Penataan Ruang	Tetap
	1.2 Kebijakan Penataan Ruang	Tetap
	1.3 Strategi Penataan Ruang	Tetap
2.	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH	
	2.1 Sistim Pusat Pelayanan	
	2.1.1 Sistim Perkotaan	
	a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Tetap
	b. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)	Tetap
	c. PPK (Pusat Pelayanan Kecamatan)	Perlu dirubah
	d. PPL (Pusat Pelayanan Lokal/Perdesaan)	Perlu dirubah
	2.2 Sistim Jaringan Prasarana	
	2.2.1 Sistim Jaringan Transportasi	
	a. Sistim Jaringan Transportasi Darat	
	1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perlu dirubah
	2) Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Perlu dirubah
	3) Jaringan Transportasi Perkotaan dan Perdesaan	Tetap
	b. Sistim Jaringan Transportasi Laut	
	1) Tatanan Kepelabuhanan	Tetap
	2) Angkutan Laut	Tetap
	2.2.2 Sistim Jaringan Energi	
	a. Pembangkit Tenaga Listrik	Tetap
	b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Tetap
	2.2.3 Sistim Jaringan Telekomunikasi	
	a. Sistim Jaringan Kabel/Terestrial	Tetap
	b. Sistim Jaringan Nirkabel/Satelit	Tetap
	2.2.4 Sistim Jaringan Sumber Daya Air	
	a. Sumber air	Tetap
	b. Prasarana sumberdaya air	Tetap
	c. Sistim jaringan Irigasi	Tetap
	d. Sistim Pengendalian Banjir	Tetap
	e. Sistim pengamanan pantai	Tetap
	2.2.5 Sistim Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	
	a. Sistim Jaringan Persampahan	Tetap
	b. Sistim Jaringan Air Minum	Tetap

No.	Muatan RTRW Kabupaten Barru	Perubahan
	c. Sistim Jaringan Air Limbah	Tetap
	d. Sistim Proteksi Kebakaran	Tetap
	e. Sistim Jaringan Drainase	Tetap
	f. Sistim Jalur Evakuasi Bencana	Tetap
3.	RENCANA POLA RUANG	
	Rencana Pola Ruang	
	3.1 Kawasan Lindung	
	3.1.1 Kawasan Hutan Lindung	Tetap
	3.1.2 Kawasan perlindungan setempat	Tetap
	3.1.3 Kawasan Suakan Alam, Pelestarian Alam, dan cagar budaya	Tetap
	3.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam	Tetap
	3.1.5 Kawasan Lindung Geologi dan Lainnya	Tetap
	3.1.1 Kawasan Hutan Lindung	Tetap
	3.2 Kawasan Budidaya	
	3.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Perlu dirubah
	3.2.2 Kawasan Hutan Produksi terbatas dan konversi	Tetap
	3.2.3 Kawasan Peruntukan Rakyat	Perlu dirubah
	3.2.4 Kawasan Peruntukan pertanian	Perlu dirubah
	3.2.5 Kawasan Peruntukan Perikanan	Tetap
	3.2.6 Kawasan Peruntukan Peternakan	Tetap
	3.2.7 Kawasan Peruntukan Pertambangan	Tetap
	3.2.8 kawasan peruntukan Industri	Tetap
	3.2.9 Kawasan Peruntukan Pariwisata	Tetap
	3.2.10 Kawasan Peruntukan Permukiman	Tetap
	3.2.11 Kawasan Peruntukan Lainnya	Tetap
4.	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS	
	4.1 Bidang Pertahanan dan Keamanan	Perlu dirubah
	4.2 Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Tetap
	4.3 Bidang Sosial Budaya	Tetap
	4.4 Bidang Pendayagunaan SDA dan / atau Teknologi Tinggi	Tetap
	4.5 Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Tetap
5.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	
	5.1 Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	
	5.1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan	Perlu dirubah
	5.1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan	Tetap
	5.1.3 Perwujudan Sistem Transportasi	Perlu dirubah

No.	Muatan RTRW Kabupaten Barru	Perubahan
	5.1.4 Perwujudan Sistem Jaringan Energi	Perlu dirubah
	5.1.5 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Tetap
	5.1.6 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Perlu dirubah
	5.1.7 Perwujudan Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Tetap
	5.1.8 Perwujudan Sistem Jar. Prasarana Lainnya	Tetap
	5.2 Pola Ruang Darat Wilayah Kabupaten	
	5.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung	Tetap
	5.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya	Perlu dirubah
6.	ARAHAN PENGENDALIAN RUANG	
	6.1 Indikasi Peraturan Zonasi	Perlu dirubah
	6.2 Arahan Perizinan	Tetap
	6.3 Arahan Insentif dan Disinsentif	Tetap
	6.4 Arahan Sanksi Administratif	Tetap

Sumber: Hasil Penilaian Tim, 2020





Terima Kasih



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Sultan Hasanuddin No.82, Sumpang Binangae, Kec. Barru,
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90712